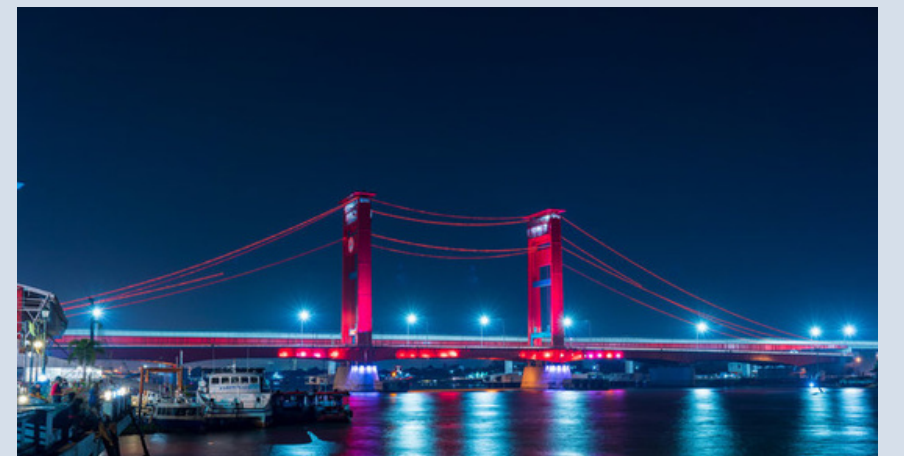




**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2023**



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024**

Kata Pengantar

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.

Sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD 1 kali dalam 1 tahun paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam rangka memenuhi maksud ketentuan diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan berupaya menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2023 di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Laporan ini sebagai keterangan dan bahan evaluasi terhadap Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah pada Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Sumatera Selatan, sehingga kedepan diharapkan Sumatera Selatan dapat meningkatkan nilai investasi dengan terciptanya iklim investasi yang kondusif dan terwujudnya kualitas pelayanan perizinan penanaman modal yang lebih efektif dan efisien.

Palembang, 27 Maret 2024

Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,



Deva Octavianus Coriza, S.E., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010301996031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
.....	
DAFTAR ISI	ii
1. Program dan Kegiatan APBD.....	1
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.....	11
A. Pelaksanaan Program	11
3. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.....	15
A. Pelaksanaan Program	15
B. Permasalahan dan Solusi.....	16
4. Program Promosi Penanaman Modal	17
A. Pelaksanaan Program	17
B. Permasalahan dan Solusi.....	19
5. Program Pelayanan Penanaman Modal.....	20
A. Pelaksanaan Program	20
B. Permasalahan dan Solusi.....	22
6. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.....	24
A. Pelaksanaan Program	24
B. Permasalahan dan Solusi.....	24
7. Program Pengelolaan Data dan Sistrim Informasi Penanaman Modal.....	25
A. Pelaksanaan Program	25
B. Permasalahan dan Solusi.....	26
8. PENUTUP	27



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU (DPMPTSP) PROVINSI SUMATERA SELATAN
Tahun 2024**

1. Program dan Kegiatan APBD

Pada Tahun Anggaran 2023 Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan tertuang dalam 6 (*Enam*) Program dengan 13 (*Tiga belas*) Kegiatan serta 34 (*Tiga Puluh Empat*) Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan Visi dan Misi Organisasi.

Adapun Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 tersebut adalah sebagai berikut:

No.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
i.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
ii.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
7.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
8.	Koordinasi dan Penyusunan Perihal Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
9.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
iii.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

10.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
iv.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
11.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
14.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
16.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
v.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
17.	Pengadaan Mebel
18.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
vi.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
19.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
20.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
21.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
vii.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
22.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
23.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
24.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
II.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
i.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
25.	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
ii.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
26.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
III.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
i.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
27.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

28.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
IV.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
i.	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
29.	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
30.	Penyediaan pelayanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan non perizinan
V.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
i.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
31.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
32.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
33.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
VI	PROGRAM PENGELOLAAN DATA SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
i.	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
34.	Pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi Perizinan dan non perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

Total Pagu Anggaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBD Prov. Sumsel Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 25.675.932.540,- (**Dua Puluh Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah**) sebelum pergeseran dan setelah pergeseran sebesar Rp. 24.891.577.540,- (**Dua Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah**) yang terdiri atas :

Belanja Daerah	: Rp. 24.891.577.540
Belanja Operasi	: Rp. 21.521.577.540
Belanja Pegawai	: Rp. 12.942.977.000
Belanja Barang dan Jasa	: Rp. 8.578.600.540

Belanja Modal	: Rp. 3.370.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	: Rp. 3.370.000.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	:
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	:

Program dan Anggaran APBD

Dari pagu anggaran yang tersedia tersebut, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan mempunyai 6 (Enam) Program dan 34 (Tiga Puluh Empat) sub Kegiatan, dengan program dan anggaran antara lain sebagai berikut:

- o Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Anggaran Rp. 20.046.449.540,- (Dua Puluh Milyar Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah)
- o Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan Anggaran Rp. 1.187.700.000,- (Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
- o Program Promosi Penanaman Modal dengan Anggaran Rp. 1.260.950.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- o Program Pelayanan Penanaman Modal dengan Anggaran Rp. 650.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- o Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan Anggaran Rp. 1.656.478.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah)
- o Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan Anggaran Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);

Realisasi Anggaran belanja yang ada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada uraian berikut:

NO	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Dana	: Rp 10.000.000
	Realisasi Keuangan	: Rp 9.876.100
	- Persentase Keuangan	: 98.76 %

	- Persentase Fisik	:	100%
2.	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD		
	Dana	:	Rp 25.000.000
	Realisasi Keuangan	:	Rp 24.116.000
	- Persentase Keuangan	:	96,46 %
	- Persentase Fisik	:	100%
3.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
	Dana	:	Rp 20.000.000
	Realisasi Keuangan	:	Rp 19.925.000
	- Persentase Keuangan	:	99.63 %
	- Persentase Fisik	:	100%
4.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		
	Dana	:	Rp 30.000.000
	Realisasi Keuangan	:	Rp 29.674.400
	- Persentase Keuangan	:	98.91 %
	- Persentase Fisik	:	100.00%
5.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
	Dana	:	Rp 12.850.337.000
	Realisasi Keuangan	:	Rp 10.814.164.149
	- Persentase Keuangan	:	84.15 %
	- Persentase Fisik	:	100%
6.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
	Dana	:	Rp 816.568.000
	Realisasi Keuangan	:	Rp 806.286.000
	- Persentase Keuangan	:	98.74 %
	- Persentase Fisik	:	100.00%
7.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
	Dana	:	Rp 92.640.000

	Realisasi Keuangan	:	Rp 84.960.000
	- Persentase Keuangan	:	91.71%
	- Persentase Fisik	:	100.00%
8.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		
	Dana	:	Rp 10.000.000
	Realisasi Keuangan	:	Rp 9.983.700
	- Persentase Keuangan	:	99.84 %
	- Persentase Fisik	:	100.00%
9.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
	Dana	:	Rp 8.000.000
	Realisasi Keuangan	:	Rp 7.802.100
	- Persentase Keuangan	:	97.53 %
	- Persentase Fisik	:	100.00 %
10.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
	Dana	:	Rp 61.000.000
	Realisasi Keuangan	:	Rp 52.063.700
	- Persentase Keuangan	:	85.35 %
	- Persentase Fisik	:	100.00%
11.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		
	Dana	:	Rp 40.000.000.-
	Realisasi Keuangan	:	Rp 39.994.900
	- Persentase Keuangan	:	99.99 %
	- Persentase Fisik	:	100.00%
12.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
	Dana	:	Rp 870.000.000
	Realisasi Keuangan	:	Rp 867.135.000
	- Persentase Keuangan	:	99.67 %

	- Persentase Fisik	:	100.00%
13.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
	Dana	:	Rp 384.370.540
	Realisasi Keuangan	:	Rp 384.194.950
	- Persentase Keuangan	:	99.95 %
	- Persentase Fisik	:	100 %
14.	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan		
	Dana	:	Rp 186.234.000
	Realisasi Keuangan	:	Rp 120.276.000
	- Persentase Keuangan	:	64.58 %
	- Persentase Fisik	:	100.00%
15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
	Dana	:	Rp 11.000.000
	Realisasi Keuangan	:	Rp 10.998.000
	- Persentase Keuangan	:	99.98 %
	- Persentase Fisik	:	100 %
16.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
	Dana	:	Rp 821.300.000
	Realisasi Keuangan	:	Rp 819.299.038
	- Persentase Keuangan	:	99.76 %
	- Persentase Fisik	:	100.00%
17.	Pengadaan Mebeler		
	Dana	:	Rp 150.000.000
	Realisasi Keuangan	:	Rp 149.975.000
	- Persentase Keuangan	:	99.98 %
	- Persentase Fisik	:	100.00%
18.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
	Dana	:	Rp 2.350.000.000
	Realisasi Keuangan	:	Rp 2.348.000.000
	- Persentase Keuangan	:	99.91 %
	- Persentase Fisik	:	100.00%
19.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		

	Dana	:	Rp	12.000.000
	Realisasi Keuangan	:	Rp	12.000.000
	- Persentase Keuangan	:		100.00%
	- Persentase Fisik	:		100.00%
20.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
	Dana	:	Rp	468.000.000
	Realisasi Keuangan	:	Rp	428.158.389
	- Persentase Keuangan	:		91.49 %
	- Persentase Fisik	:		100.00%
21.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
	Dana	:	Rp	220.000.000
	Realisasi Keuangan	:	Rp	218.150.000
	- Persentase Keuangan	:		99.16 %
	- Persentase Fisik	:		100.00%
22.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
	Dana	:	Rp	330.000.000
	Realisasi Keuangan	:	Rp	329.696.858
	- Persentase Keuangan	:		99.91 %
	- Persentase Fisik	:		100 %
23.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
	Dana	:	Rp	60.000.000
	Realisasi Keuangan	:	Rp	59.985.000
	- Persentase Keuangan	:		99.98 %
	- Persentase Fisik	:		100 %
24.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
	Dana	:	Rp	220.000.000

	Realisasi Keuangan	:	Rp	219.716.315
	- Persentase Keuangan	:		99.87 %
	- Persentase Fisik	:		100 %
II.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
1.	Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi			
	Dana	:	Rp	203.500.000
	Realisasi Keuangan	:	Rp	179.272.651
	- Persentase Keuangan	:		88.09 %
	- Persentase Fisik	:		100.00%
2.	Pembuatan Peta Provinsi dan Peluang Usaha Provinsi			
	Dana	:	Rp	984.200.000
	Realisasi Keuangan	:	Rp	958.856.949
	- Persentase Keuangan	:		97.43 %
	- Persentase Fisik	:		100.00%
III.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENGAN PROVINSI			
1.	Penyusunan Strategi Promosi Promosi Modal Kewengan Provinsi			
	Dana	:	Rp	527.330.000
	Realisasi Keuangan	:	Rp	505.114.704
	- Persentase Keuangan	:		95.79 %
	- Persentase Fisik	:		100 %
2.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Promosi Modal Kewengan Provinsi			
	Dana	:	Rp	733.620.000
	Realisasi Keuangan	:	Rp	731.567.023
	- Persentase Keuangan	:		99.72 %
	- Persentase Fisik	:		100 %
IV	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
1.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
	Dana	:	Rp	450.000.000
	Realisasi Keuangan	:	Rp	432.137.965
	- Persentase Keuangan	:		96.03 %
	- Persentase Fisik	:		100%

2.	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	
	Dana	: Rp 200.000.000
	Realisasi Keuangan	: Rp 177.577.080
	- Persentase Keuangan	: 88.79 %
	- Persentase Fisik	: 100 %
V	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
	Pengendalian Pelaksanaan Modal yang Menjadi Kewengan Provinsi	
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	
	Dana	: Rp 339.840.000
	Realisasi Keuangan	: Rp 319.337.752
	- Persentase Keuangan	: 93.97 %
	- Persentase Fisik	: 100 %
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	
	Dana	: Rp 512.550.000
	Realisasi Keuangan	: Rp 423.565.478
	- Persentase Keuangan	: 82.64 %
	- Persentase Fisik	: 100 %
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	
	Dana	: Rp 804.088.000
	Realisasi Keuangan	: Rp 748.892.090
	- Persentase Keuangan	: 93.14 %
	- Persentase Fisik	: 100 %
VI	PROGRAM PENGELOLAAN DATA SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
1.	Pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi Perizinan dan non perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	
	Dana	: Rp 220.000.000
	Realisasi Keuangan	: Rp 218.707.087
	- Persentase Keuangan	: 99.41%

- Persentase Fisik	:	100%
--------------------	---	------

Rincian Laporan Keuangan pelaksanaan program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

Pagu Anggaran Awal	:	Rp.	25.675.932.540,-
Pagu Anggaran Perubahan	:	Rp.	24.891.577.540,-
Belanja Operasional	:	Rp.	21.521.577.540,-
Belanja Modal	:	Rp.	3.370.000.000,-
Surat Permintaan Pencairan Dana			
Uang Persediaan (SP2D UP)	:	Rp.	400.000.000,-
Surat Permintaan Pencairan Dana			
Ganti Uang /Tambah Uang			
(SP2D GU/TU)	:	Rp.	4.505.629.814,-
Surat Permintaan Pencairan Dana			
Langsung (SP2D LS) Gaji + TPP	:	Rp.	13.279.779.844,-
Surat Permintaan Pencairan Dana			
Langsung (SP2D LS) Barang & Jasa	:	Rp.	4.640.552.187,-
Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)			
Uang Persediaan/Ganti Uang/			
Langsung (UP/GU/TU/LS)			
Barang & Jasa	:	Rp.	22.425.961.845,-
Sisa Pagu Anggaran			
Langsung (LS) Gaji	:	Rp.	465.235.658,-
Sisa Pagu Anggaran	:	Rp.	2.465.615.695,-
Sisa Uang Untuk Dipertanggung Jawabkan (UUDP)			
Dari Pagu Anggaran	:	Rp.	24.891.577.540,-
Realisasi terpakai / SPJ	:	Rp.	22.425.961.845,- (90,09%)
yang tidak terpakai	:	Rp.	2.465.615.695,- (9,91%)

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

A. Pelaksanaan Program

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Dana tersedia Rp. 10.000.000,-, Realisasi keuangan Rp. 9.876.100,-, persentase keuangan 98,76 %. Hasil kegiatan adalah Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD tahun n+1 yang tersusun.
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Dana tersedia Rp. 25.000.000,-, Realisasi keuangan Rp. 24.116.000,-, persentase keuangan 96,46 %. Hasil kegiatan adalah Tersedianya Dokumen RKA SKPD yang tersusun.
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Dana tersedia Rp. 20.000.000,-, Realisasi keuangan Rp. 19.925.000,-, persentase keuangan 99,63 %. Hasil kegiatan adalah tersedianya Dokumen DPA-SKPD.
4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Dana tersedia Rp. 15.000.000,-, Realisasi keuangan Rp. 14.375.000,-, persentase keuangan 95,83 %. Hasil kegiatan adalah Tersedianya Dokumen DPA SKPD yang tersusun.
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dana tersedia Rp. 30.000.000,-, Realisasi keuangan Rp. 29.674.400,-, persentase keuangan 98,91 %. Hasil kegiatan adalah Tersedianya Dokumen Laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun.
6. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Dana tersedia Rp. 12.850.337.000,-, Realisasi keuangan Rp. 10.814.164.149,-, persentasi keuangan 84,15 %. Hasil kegiatan adalah Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN selama 1 Tahun.
7. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Dana tersedia Rp. 816.568.000,-, Realisasi keuangan Rp. 806.286.000,-, persentase keuangan 98,74 %. Hasil kegiatan adalah terbayarnya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran selama 1 Tahun.
8. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Dana tersedia Rp. 92.640.000,-, Realisasi keuangan Rp. 84.960.000,-, persentase keuangan 91,71 %. Hasil kegiatan adalah terbayarnya jasa pengelola administrasi keuangan dan barang selama 1 Tahun.
9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Dana tersedia Rp. 10.000.000,-, Realisasi keuangan Rp. 9.983.700,-, persentase keuangan 99,84 %. Hasil kegiatan adalah Tersedianya laporan Keuangan akhir tahun SKPD.

10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Dana tersedia Rp. 8.000.000,-, Realisasi keuangan Rp. 7.802.100,-, persentase keuangan 97,53 %. Hasil kegiatan adalah tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD selama 1 Tahun.

11. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dana tersedia Rp. 61.000.000,-, Realisasi keuangan Rp. 52.063.700,-, persentase keuangan 85,35 %. Hasil kegiatan adalah terlaksananya aparatur yang mengikuti pelatihan formal, diklat/kursus selama 1 Tahun.

12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Dana tersedia Rp. 40.000.000,-, Realisasi keuangan Rp. 39.994.900,-, persentase keuangan 99,99 %. Hasil kegiatan adalah tersedianya komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor selama 1 Tahun.

13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dana tersedia Rp. 870.000.000,-, Realisasi keuangan Rp. 867.135.000,-, persentase keuangan 99,67 %. Hasil kegiatan adalah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.

14. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Dana tersedia Rp. 384.370.540,-, Realisasi keuangan Rp. 384.194.950,-, persentase keuangan 99,95 %. Hasil kegiatan adalah tersedianya ATK, makan minum rapat serta peralatan dan bahan pembersih selama 1 Tahun.

15. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Dana tersedia Rp. 186.234.000,-, Realisasi keuangan Rp. 120.276.000,-, persentase keuangan 64,58 %. Hasil kegiatan adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 1 Tahun.

16. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Dana tersedia Rp. 11.000.000,-, Realisasi keuangan Rp. 10.998.000,-, persentase keuangan 99,98 %. Hasil kegiatan adalah tersedianya bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan selama 1 Tahun.

17. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Dana tersedia Rp. 821.300.000,-, Realisasi keuangan Rp. 819.299.038,-, persentase keuangan 99,76 %. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi selama 1 tahun.

18. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Dana tersedia Rp. 2.350.000.000,-, Realisasi keuangan Rp. 2.348.000.000,-, persentase keuangan 99,91 %. Hasil kegiatan adalah Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

19. Pengadaan Mebel

Dana tersedia Rp. 150.000.000,-, Realisasi keuangan Rp. 149.975.000,-, persentase keuangan 99,98 %. Hasil kegiatan adalah tersedianya meubeler.

20. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dana tersedia Rp. 12.000.000,-, Realisasi keuangan Rp. 12.000.000,-, persentase keuangan 100 %. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat dinas selama 1 tahun.

21. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dana tersedia Rp. 468.000.000,-, Realisasi keuangan Rp. 428.158.389,-, persentase keuangan 91,49 %. Hasil kegiatan adalah Terbayarnya Rekening Air, Listrik, telepon dan Internet dinas selama 1 Tahun.

22. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Dana tersedia Rp. 220.000.000,-, Realisasi keuangan Rp. 218.150.000,-, persentase keuangan 99,16 %. Hasil kegiatan adalah Tersedianya Jasa Kebersihan Gedung kantor dan terbayarnya jasa tutor SKJ selama 1 tahun.

23. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Dana tersedia Rp. 330.000.000,-, Realisasi keuangan Rp. 329.696.858,-, persentase keuangan 99,91 %. Hasil kegiatan adalah Terpeliharanya, dan terbayarnya biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional.

24. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Dana tersedia Rp. 60.000.000,-, Realisasi keuangan Rp. 59.985.000,-, persentase keuangan 99,98 %. Hasil kegiatan adalah Terpeliharanya instalasi listrik dan telepon selama 1 tahun.

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Dana tersedia Rp. 220.000.000,-, Realisasi keuangan Rp. 219.716.315,-, persentase keuangan 99,87 %. Hasil kegiatan adalah Terpeliharanya/Terehabilitasinya Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor.

3. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

A. Pelaksanaan Program

1. Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Dana tersedia Rp. 203.500.000,-, Realisasi Keuangan Rp. 179.272.651,-, persentase keuangan 88,09 %.

Hasil:

- a. Mengidentifikasi dan mengumpulkan data / informasi Provinsi maupun Kab/kota lainnya di Indonesia yang telah menyusun Peraturan serupa sebagai bahan perbandingan dalam rangka penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan pemberian insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal dan Pergub Pengawasan.
- b. Melanjutkan jadwal dan proses pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang pedoman Pelaksanaan pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal dan Peraturan Gubernur tentang Pengawasan dengan melakukan koordinasi ke Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Output:

beberapa peraturan yang telah difasilitasi antara lain:

- ❖ Raperbup tentang bentuk pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal (Kab. Musi Banyuasin) pada Oktober 2023.
- ❖ Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Kab. Ogan Ilir) pada Oktober 2023
- ❖ Raperbup tentang petunjuk pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko (Kab. Musi Banyuasin) pada November 2023.
- ❖ Raperbup tentang pendelegasian wewenang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kepada DPMPTSP (Kab. Ogan Komering Ulu) pada Desember 2023.
- ❖ Raperbup tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal (Kab. Musi Rawas Utara) pada Desember 2023.

2. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi

Dana tersedia Rp.984.200.000,-, Realisasi keuangan Rp.958.856.949,-, persentase keuangan 97,43 %.

Hasil:

Pada tahun 2023 ini telah dilaksanakan penyusunan dokumen perencanaan sejumlah 2 dokumen yaitu dokumen Analisis iklim investasi dan roadmap hilirisasi peluang investasi produk kelapa sawit. Sedangkan untuk proyek peluang investasi ada 3 proyek yaitu yang berlokasi di kab. Banyuasin, MUBA dan OKUT.

Output:

Adapun 5 (lima) dokumen kajian yang telah dibuat pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- Penyusunan dokumen/kajian analisis iklim investasi Provinsi Sumatera Selatan.
- Penyusunan dokumen peluang investasi industri produk kelapa terpadu (Kabupaten Banyuasin).
- Penyusunan dokumen peluang investasi pemanfaatan tankos kelapa sawit (Kabupaten Musi Banyuasin).
- Penyusunan dokumen roadmap hilirisasi peluang investasi komoditi kelapa sawit Sumatera Selatan.
- Penyusunan dokumen peluang investasi industri penyosohan beras di Kabupaten OKU Timur.

B. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Sarana peralatan kantor seperti Laptop, Komputer PC belum dengan spesifikasi yang tinggi sehingga menghambat dalam melaksanakan kegiatan tugas pokok dan fungsi bidang. Kurangnya jumlah printer yang efektif juga menjadi kendala dalam menyelesaikan pekerjaan.
- Masih kurangnya SDM aparatur yang trampil untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang.

2. Solusi

- Kebutuhan sarana peralatan perlengkapan kantor seperti Laptop dan komputer PC dengan spesifikasi tinggi, serta kebutuhan peralatan kantor lainnya akan diusulkan pada usulan Renja 2024.
- Usulan kebutuhan terhadap SDM aparatur yang trampil akan disampaikan kepada kepala dinas PMPTSP Prov. Sumsel.

4. Program Promosi Penanaman Modal

A. Pelaksanaan Program

1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

Dana tersedia Rp. 733.620.000,-, Realisasi keuangan Rp. 731.567.023,-, persentase keuangan 99,72 %. Hasil kegiatan adalah:

- a. Pameran Investasi Indonesia Tourism & Trade Investment Expo 2023 “Prioritas Bandung”, 11-14 Mei 2023 di City Mall Bandung Provinsi Jawa Barat.
- b. Pameran Investasi Discovery Of South Sumatera “The Journey Of Sriwijaya Kingdom”, 6-28 Mei 2023 Hotel Borobudur Jakarta.
- c. Pameran Investasi Indonesia Tourism & Trade Investment Expo 2023 “Prioritas Batam”, 15-18 Juni 2023 Nagoya Hill Mall Batam.
- d. Pameran Investasi Sumatera Multi Investment & Trade (SUMMIT), 23-26 Agustus 2023, PTC Mall Palembang Sumatera Selatan.
- e. Pameran KADIN SUMSEL EXPO 2023 27-29 Oktober 2023, PSCC Mall Palembang.
- f. TALKSHOW DIALOG INVESTASI KADIN SUMSEL EXPO 2023 27 Oktober 2023 PSCC Mall Palembang.
- g. Pameran Investasi Indonesia Tourism & Trade Investment Expo 2023 “Prioritas Yogyakarta”, 16-19 November 2023 Jogja City Mall (JGM Mall), Yogyakarta.

2. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

Dana tersedia Rp. 527.330.000,-, Realisasi keuangan Rp. 505.114.704,-, persentase keuangan 95,79 %.

Hasil kegiatan antara lain:

- a. Koordinasi dengan kementerian Investasi/BKPM RI untuk melakukan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal di Provinsi Sumatera Selatan yang akan dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri atas 17 kabupaten Kota.

Kegiatan ini dilakukan untuk memberi sosialisasi pada perangkat daerah pentingnya penyusunan strategi promosi untuk menarik minat investor serta membuat mereka berinvestasi di Sumatera Selatan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- Sinergi Nasional dan Lokal: Dengan berkoordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM RI, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat memastikan bahwa strategi promosi yang disusun sejalan dengan kebijakan nasional dan mendukung agenda investasipemerintah pusat. Hal ini membantu dalam menciptakan sinergi antara tingkat nasional dan lokal dalam upaya menarik investasi.
- Akses ke Sumber Daya dan Informasi: Melalui koordinasi dengan BKPM, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat memperoleh akses ke sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk menyusun strategi promosi penanaman modal yang efektif. BKPM memiliki data dan analisis yang komprehensif tentang tren investasi dan preferensi investor, yang dapat digunakan untuk mengarahkan strategi promosi.
- Dukungan Teknis dan Bantuan: BKPM dapat memberikan dukungan teknis dan bantuan dalam menyusun strategi promosi penanaman modal, termasuk dalam hal perencanaan, analisis pasar, pengembangan materi promosi, serta strategi komunikasi yang efektif.
- Pemetaan Potensi Investasi: Melalui kolaborasi dengan BKPM, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat melakukan pemetaan potensi investasi di wilayah tersebut. Ini melibatkan identifikasi sektor-sektor yang paling menarik bagi investor serta potensi proyek-proyek investasi yang dapat dikembangkan di setiap kabupaten/kota.
- Penguatan Jejaring dan Kerjasama: Kerjasama dengan BKPM memungkinkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk memperluas jaringannya dan memperkuat kerjasama dengan pihak-pihak terkait lainnya, termasuk lembaga keuangan, asosiasi bisnis, dan investor potensial baik dari dalam maupun luar negeri.

Dengan demikian, tujuan dari koordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM RI adalah untuk memastikan bahwa strategi promosi penanaman modal yang disusun memiliki landasan yang kuat, didukung oleh data dan analisis yang komprehensif, serta terintegrasi dengan kebijakan nasional untuk mencapai hasil yang optimal dalam menarik investasi ke Provinsi Sumatera Selatan.

- b. Forum Bisnis Peluang Potensi dan Investasi Provinsi Sumatera Selatan, 24 Agustus 2023, Novotel Hotel Palembang Sumatera Selatan.

Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk:

- Membuka peluang bisnis baru: Forum ini bertujuan untuk memberikan platform bagi para pelaku bisnis dan calon investor untuk mengeksplorasi peluang bisnis baru di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja baru.
- Mempromosikan potensi ekonomi daerah: Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi ekonomi yang beragam, termasuk sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, dan industri. Forum ini bertujuan untuk mempromosikan potensi-potensi tersebut kepada para peserta agar dapat menarik minat investor serta mengembangkan bisnis yang berkelanjutan.
- Membangun jaringan dan kolaborasi: Forum ini juga bertujuan untuk memfasilitasi pembangunan jaringan dan kolaborasi antara pelaku bisnis, investor, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya. Melalui pertukaran ide, pengalaman, dan sumber daya, diharapkan dapat tercipta sinergi yang saling menguntungkan dalam mengembangkan bisnis dan investasi di Provinsi Sumatera Selatan.
- Memperkuat investasi dan pertumbuhan ekonomi: Dengan menyelenggarakan forum ini, diharapkan dapat meningkatkan investasi baik dari dalam maupun luar negeri di Provinsi Sumatera Selatan. Investasi yang kuat akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dengan demikian, kegiatan ini merupakan ajang strategis untuk memperkuat ekosistem bisnis dan investasi di Provinsi Sumatera Selatan serta memajukan pembangunan ekonomi daerah secara keseluruhan. Dimana narasumber berasal dari Kementrian Investasi/BKPM RI, KADIN, HIPMI, dan DITJEN PERBENDAHARAAN KEMENKEU RI

B. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Masih belum validnya data peluang dan potensi daerah yang disajikan kabupaten/kota dalam bentuk form baku.
- b. Masih banyak kegiatan Promosi Investasi yang merupakan peluang untuk menarik para investor tetapi belum dapat dilaksanakan karena masih keterbatasan anggaran.
- c. Keterbatasan SDM Promosi yang ada di kabupaten/kota dalam upaya pengemasan materi promosi peluang/potensi daerah.
- d. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral dalam upaya promosi dan publikasi peluang/potensi investasi daerah.

2. Solusi

- a. Segera dilakukan validasi data pemetaan peluang dan potensi investasi daerah
- b. Analisa pasar yang detail dalam memasarkan peluang dan potensi investasi daerah.
- c. Rapat koordinasi lintas sektoral untuk mengemas bahan promosi investasi dan pelaksanaan kegiatan pameran investasi daerah serta kegiatan forum bisnis yang mengundang para investor dapat lebih sering dilakukan sehingga strategi pemasaran potensi daerah dapat berjalan lebih optimal. (Baik secara offline dan Online).

5. Program Pelayanan Penanaman Modal

A. Pelaksanaan Program

1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Dana tersedia Rp. 450.000.000,-, Realisasi keuangan Rp. 432.137.965,-, persentase keuangan 96,03 %.

Hasil kegiatan adalah meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, terintegrasi dan transparan.

Realisasi jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan selama tahun 2023 sebanyak 1818 perizinan dan non perizinan dari target 1064 perizinan dan non perizinan tercapai sebesar 170,86%. Angka ini telah mencapai target yang ditentukan yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a) Peralihan proses Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah berjalan dengan baik terkait mekanisme sistem OSS RBA di daerah.

- b) Dengan Terbitnya Perpres No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara maka Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Sektor Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan didelegasikan kembali kepada Pemerintah Daerah.
- c) Terbitnya Pergub No.28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Pergub 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan dimana pendelegasian wewenang bertambah yang sebelumnya 164 Perizinan Berusaha dan Non Perizinan dengan 1018 KBLI menjadi 174 Perizinan Berusaha dan Non Perizinan dengan 1064 KBLI.
- d) Terbitnya Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2019 tentang kapasitas pembangkit Listrik Untuk kepentingan sendiri, adapun salah satu isi dari permen tersebut adalah yang diwajibkan membuat izin hanya pengguna listrik diatas 500 KVA, sedangkan pelaku usaha yang menggunakan Listrik berkapasitas dibawah 500 KVA sangat banyak dan tidak wajib izin.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah. Dimana pengurusan Izin dan Non Izin berbasis risiko baik risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan risiko tinggi yang sudah berjalan dan terus dikembangkan.

2. **Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan**

Dana tersedia Rp.200.000.000,-, Realisasi keuangan Rp. 177.577.080,-, persentase keuangan 88,79%.

Hasil kegiatan adalah Indeks kepuasan Investor sebesar 88,82 masuk kategori **“Sangat Baik”** dengan Nilai Interval Konversi IKM (81,26-100) bernilai **A** di mutu pelayanan, terlaksananya penanganan pengaduan prima pada penyelenggaraan perizinan terpadu yang masuk pada

tahun 2023 sebanyak **98** Laporan dan telah diselesaikan pada hari yang sama.

B. Permasalahan dan solusi

1. Permasalahan

- a. Penyusunan Peraturan Daerah yang menyesuaikan dengan Peraturan Pusat memerlukan waktu dan koordinasi dengan berbagai stakeholder, sedangkan anggaran belum memadai untuk melakukan kegiatan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait.
- b. Permasalahan yang dialami didalam sistem OSS harus dikoordinasikan kepada Pemerintah Pusat dalam penyelesaiannya (tidak bisa secara langsung karena kendali sistem dikendalikan langsung oleh Pemerintah Pusat).
- c. Kurangnya SDM Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dimana dengan adanya penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan pendelegasian sebanyak 174 Perizinan Berusaha dan Non Perizinan maka SDM perlu ditambah untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan perizinan.
- d. Masih kurang optimalnya elemen manajemen komplain yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan yaitu: organisasi, fasilitasi reward dan punishment bagi petugas pelayanan, saluran pengaduan dan infrastruktur, manajemen data serta pendanaan operasional.
- e. Belum jelasnya jenis pengaduan yang dilaporkan apakah wewenang DPMPTSP provinsi Sumsel atau wewenang instansi/SKPD baik provinsi maupun Kabupaten/Kota
- f. Belum terlaksananya koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Selatan dalam hal sengketa pengaduan perizinan dan non perizinan.
- g. Terbatas jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten di Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan.
- h. Secara umum masyarakat belum banyak memahami saluran pengaduan baik internal maupun eksternal.

2. Solusi

- a. Melakukan koordinasi secara cepat dalam peraturan atau regulasi baru terkait penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko

sehingga pelaku usaha bisa memperoleh kepastian hukum dan dapat dilayani secara cepat, terintegrasi, dan prima

- b. Memberikan dukungan anggaran kegiatan pada Bidang P3NP untuk peningkatan kualitas SDM, Sarana dan Prasarana berbasis digital.
- c. Perlu dukungan serta komitmen penuh K/L teknis lain dalam rangka mengatasi adanya ketidaksinkronan regulasi dalam Perizinan Berusaha dalam sistem OSS RBA masih mengalami kendala.
- d. Kelengkapan elemen manajemen komplain yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan yaitu: organisasi, fasilitasi reward dan punishmen bagi petugas pelayanan, saluran pengaduan dan infrastruktur, manajemen data serta pendanaan operasional.
- e. Memberi penjelasan kepada pihak pelapor baik tertulis maupun lisan untuk meneruskan laporan kepada instansi yang berkaitan laporan tersebut.
- f. Melakukan pemantauan dan koordinasi antara DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten/Kota terkait pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- g. Diharapkan kedepannya untuk dilakukan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan.
- h. Mensosialisasikan saluran yang dapat dipilih masyarakat untuk menyalurkan pengaduannya adalah:
 1. Saluran Internal, yang dimaksudkan dengan saluran internal adalah pengaduan yang disampaikan secara langsung kepada kantor/institusi yang bersangkutan. Saluran ini dapat terdiri dari beberapa kemungkinan berikut ini:
 - Hotline (SMS, Telephone, Email, dan Website)
 - Kotak Pengaduan dan Saran
 - Survey Kepuasan Masyarakat/Investor dan Survey Persepsi Korupsi secara elektronik.
 2. Saluran Eksternal, yang dimaksudkan dengan saluran eksternal adalah pengaduan yang disampaikan tidak secara langsung kepada manajemen, tetapi melalui pihak pihak lain. Misalnya: Surat kabar, Interaktif Radio dan Televisi, Lembaga Ombudsman daerah, NGO (lokal, nasional, internasional), dan sebagainya.

6. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

A. Pelaksanaan Program

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

Dana tersedia Rp. 339.840.000,-, Realisasi keuangan Rp. 319.337.752,-, persentase keuangan 93,97 %. Hasil kegiatan adalah tersedianya data Jumlah LKPM yang disampaikan perusahaan secara online dengan tepat waktu. Target 2023 adalah 2.500 LKPM dan realisasi nya 12.898 LKPM (515,92%).

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Dana tersedia Rp. 512.550.000,-, Realisasi keuangan Rp. 423.565.478,-, persentase keuangan 82,64%. Hasil kegiatan adalah tersedianya jumlah pelaku usaha/perusahaan yang dibina. Target 2023 adalah 400 Pelaku usaha dan realisasinya adalah 601 Pelaku usaha (150,25%).

3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Dana tersedia Rp. 804.088.000,-, Realisasi keuangan Rp. 748.892.090,-, persentase keuangan 93,14 %. Hasil kegiatan adalah tersedianya jumlah perusahaan yang diawasi dengan mekanisme Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Target 2023 adalah sebanyak 75 BAP dan realisasinya adalah 124 BAP (165,33%).

B. Permasalahan dan Solusi.

1. Permasalahan

- a. Kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha terhadap sistem OSS RBA mengenai teknis penggunaan aplikasi baik perizinan maupun pelaporan.
- b. Sarana peralatan kantor seperti Laptop dan printer portable untuk kebutuhan pengawasan dan pemantauan serta pembinaan ke Lapangan belum mencukupi untuk mengakomodir tugas pokok yang dijalankan terutama di Lapangan
- c. Dengan telah dimulainya pelaksanaan kegiatan DAK non Fisik dan Dekonsentrasi TA-2023, maka dengan tiga sub kegiatan Pemantauan, Pengawasan dan pembinaan yang mempunyai kegiatan dan lokasi pelaksanaan yang berbeda, maka hal tersebut

sulit dilaksanakan dengan baik bila tidak dilaksanakan sistem manajemen yang baik dan sarana dan prasarana memadai.

- d. Masih kurangnya SDM aparatur yang trampil untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang.

2. Solusi

- a. Pegawai Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal melakukan kunjungan ke perusahaan atau melakukan bimbingan teknis/sosialisasi untuk memberikan pemahaman tentang pelaporan LKPM dan migrasi dari OSS 1.1 menjadi OSS RBA.
- b. Kebutuhan sarana peralatan perlengkapan kantor seperti 3 (tiga) Laptop dan 3 (tiga) printer portable serta lainnya, seharusnya tersedia sesuai dengan dana pagu APBD TA-2023 Bidang Dallak yang sudah dialokasikan Bidang Dallak ke kedalam DPA Kegiatan Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor DPMPTSP Prov. Sumsel TA-2023. Hal ini perlu dicermati bersama sesuai tata cara prosedur pengelolaan perencanaan perangkat daerah, apabila sasaran target penyerapan anggaran DAK non Fisik dan Dekonsentrasi BKPM RI sertapelaksanaan kinerja yang baik masih menjadi hal yang penting bagi DPMPTSP Prov. Sumsel.
- c. Dalam hal peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap LKPM perlu ditingkatkan melalui koordinasi dan pembinaan.
- d. Kebutuhan terhadap SDM aparatur yang trampil akan dilaksanakan melalui evaluasi dan verifikasi terhadap anjab dan beban kerja Bidang, sehingga diketahui kebutuhan jumlah SDM yang dibutuhkan.

7. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

A. Pelaksanaan Program

- 1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.**

Dana tersedia Rp. 90.000.000,-, Realisasi keuangan Rp. 83.209.554,-, persentase keuangan 92,46%.

Hasil kegiatan:

Angka 1 merupakan perolehan dari perbandingan tingkat capaian Layanan data dan SI PM terhadap tingkat ketersediaan data dan SI PM yang diberikan. Dengan asumsi masing-masing target pada pencapaian akhir tahun adalah 100% maka angka perbandingan yang didapat adalah angka 1, yang diindikasikan bahwa layanan data dan informasi sesuai dengan kebutuhan data dan informasi yang tersedia. Capaian pada triwulan IV 2023 dengan tolok ukur sebagai berikut: Ketersediaan data untuk TW IV 2023: (nilai 0,86)

- a) Data Realisasi Investasi: Tersedia
- b) Data Perizinan dan non Perizinan; tersedia
- c) Data IKM dan IPK: tersedia
- d) Data realisasi LRA: tersedia
- e) Data regulasi/deregulasi: tersedia
- f) Data SDM: tersedia
- g) Data Kemitraan: belum tersedia

Media Layanan data dan Informasi: (nilai 0,67)

- a) Buku Data Kinerja: tersedia
- b) Aplikasi Layanan Data: belum tersedia (dlm proses validasi)
- c) Informasi petugas data: tersedia

Dari uraian diatas dapat dihitung rasio capaian sebesar 0,78 dari target yang ditetapkan sebesar 1 pada triwulan IV 2023 ini atau hanya mencapai 77,91%. Hal ini disebabkan masih belum optimalnya proses pengelolaan data dan informasi yang tersedia melalui ketersediaan data maupun mekanisme layanan data.

B. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Belum tercapainya rasio tingkat layanan terhadap ketersediaan data dan sistem informasi PM tahun 2023 sesuai target angka 1

pada TW IV 2023 hanya mencapai angka 0,78 atau tercapai 77,91%.

2. Solusi

- a. Perlunya peningkatan pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan cara penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan Sarana Prasana baik Hardware maupun Software yang mendukung Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal yang terbaru dan terkini.

10. PENUTUP

Demikian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi Sumatera Selatan di Bidang Penanaman Modal masa 1 Januari s/d 31 Desember 2023 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Selatan disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Plh. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**




Deva Octavianus Coriza, S.E., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010301996031004

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DAN KEGIATAN APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi	Keterangan
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini						
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	20.046.449.540	100,00	89,13	17.866.430.599	Persentase program penunjang urusan pemerintahan Daerah Povinsi Daerah Povinsi yang tercapai	100%	100,00		100,00	80,54	Provinsi Sumatera Selatan	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.000.000	100,00	98,34	83.591.500	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	9 Dokumen	100,00		100,00	0,34	Provinsi Sumatera Selatan	
2	Sub Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	100,00	98,76	9.876.100	Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD tahun n+1 yang tersusun	2 Dokumen	100,00		100,00	0,04	Provinsi Sumatera Selatan	
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	25.000.000	100,00	96,46	24.116.000	Tersedianya Dokumen RKA SKPD yang tersusun	2 Dokumen	100,00		100,00	0,10	Provinsi Sumatera Selatan	
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20.000.000	100,00	99,63	19.925.000	Tersedianya Dokumen DPA SKPD yang tersusun	2 Dokumen	100,00		100,00	0,08	Provinsi Sumatera Selatan	
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000	100,00	98,91	29.674.400	Tersedianya Dokumen Laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	3 Laporan	100,00		100,00	0,12	Provinsi Sumatera Selatan	
6	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.777.545.000	100,00	85,09	11.723.195.949	Tersedianya administrasi keuangan perangkat Daerah	1 Tahun	100,00		100,00	55,35	Provinsi Sumatera Selatan	
7	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.850.337.000	100,00	84,15	10.814.164.149	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	100,00		100,00	51,63	Provinsi Sumatera Selatan	
8	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	816.568.000	100,00	98,74	806.286.000	Terbayarnya Jasa tenaga pendukung Adm Perkantoran	32 orang / Bulan selama 1 Tahun	100,00		100,00	3,28	Provinsi Sumatera Selatan	
9	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	92.640.000	100,00	91,71	84.960.000	Terbayarnya jasa pengelola adm keuangan dan barang	9 orang / tahun	100,00		100,00	0,37	Provinsi Sumatera Selatan	
10	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	100,00	99,84	9.983.700	Tersedianya laporan Keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	100,00		100,00	0,04	Provinsi Sumatera Selatan	
11	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8.000.000	100,00	97,53	7.802.100	Tersedianya laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semester an SKPD	18 Laporan	100,00		100,00	0,03	Provinsi Sumatera Selatan	
12	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61.000.000	100,00	85,35	52.063.700	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Tahun	100,00		100,00	0,25	Provinsi Sumatera Selatan	
13	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	61.000.000	100,00	85,35	52.063.700	Terlaksananya Aparatur yang mengikuti pelatihan formal, diklat/kursus	10 orang	100,00		100,00	0,25	Provinsi Sumatera Selatan	

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi	Keterangan
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini						
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
14	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.312.904.540	100,00	96,93	2.241.897.888	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	100,00		100,00	9,29	Provinsi Sumatera Selatan	
15	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000	100,00	99,99	39.994.900	Tersedianya unit/pcs komponen instalasi listrik	1 tahun	100,00		100,00	0,16	Provinsi Sumatera Selatan	
16	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	870.000.000	100,00	99,67	867.135.000	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	25 Unit	100,00		100,00	3,50	Provinsi Sumatera Selatan	
17	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	384.370.540	100,00	99,95	384.194.950	Tersedianya ATK, makan minum rapat, peralatan dan bahan pembersih	1 tahun, 1 tahun, dan 25 unit	100,00		100,00	1,54	Provinsi Sumatera Selatan	
18	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	186.234.000	100,00	64,58	120.276.000	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	100,00		100,00	0,75	Provinsi Sumatera Selatan	
19	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.000.000	100,00	99,98	10.998.000	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	2160 Expsemplar / buku yang tersedia	100,00		100,00	0,04	Provinsi Sumatera Selatan	
20	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	821.300.000	100,00	99,76	819.299.038	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	120 kali	100,00		100,00	3,30	Provinsi Sumatera Selatan	
21	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.500.000.000	100,00	99,92	2.497.975.000	Persentase pengadaan BMD yang tercapai	100%	100,00		100,00	10,04	Provinsi Sumatera Selatan	
22	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	150.000.000	100,00	99,98	149.975.000	Tersedianya meubeler	15 Unit	100,00		100,00	0,60	Provinsi Sumatera Selatan	
22	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.350.000.000	100,00	99,91	2.348.000.000	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	100,00		100,00	9,44	Provinsi Sumatera Selatan	
23	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	700.000.000	100,00	94,04	658.308.389	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercapai	100%	100,00		100,00	2,81	Provinsi Sumatera Selatan	
24	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	100,00	100,00	12.000.000	Tersedianya Dokumen / surat	400 Dok/Surat	100,00		100,00	0,05	Provinsi Sumatera Selatan	
24	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air, dan Listrik	468.000.000	100,00	91,49	428.158.389	Terbayarnya Rekening Air, Listrik, telepon dan Internet	48 Kwitansi Rek	100,00		100,00	1,88	Provinsi Sumatera Selatan	
25	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	220.000.000	100,00	99,16	218.150.000	Tersedianya Jasa Kebersihan Gedung kantor dan terbayarnya jasa tutor SKJ	1 Tahun, 44 kali	100,00		100,00	0,88	Provinsi Sumatera Selatan	
26	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	610.000.000	100,00	99,90	609.398.173	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dan siap operasional	100%	100,00		100,00	2,45	Provinsi Sumatera Selatan	
27	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	330.000.000	100,00	99,91	329.696.858	Terpeliharanya, dan terbayarnya biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional	14 unit (5 R2, 9 R4)	100,00		100,00	1,33	Provinsi Sumatera Selatan	

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi	Keterangan
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini						
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
28	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000	100,00	99,98	59.985.000	Terpeliharanya instalasi listrik dan telepon	1 Tahun	100,00		100,00	0,24	Provinsi Sumatera Selatan	
29	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	220.000.000	100,00	99,87	219.716.315	Terpelihara/terrehabilitasinya gedung kantor	1 unit, 1 tahun	100,00		100,00	0,88	Provinsi Sumatera Selatan	
II	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	1.187.700.000	100,00	95,83	1.138.129.600	Tercapainya persentase pertumbuhan investasi Penanaman Modal	7%	100,00		100,00	4,77	Provinsi Sumatera Selatan	
30	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	203.500.000	100,00	88,09	179.272.651	Jumlah regulasi /kebijakan yang ditetapkan	2 dokumen regulasi	100,00		100,00	0,82	Provinsi Sumatera Selatan	
31	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	203.500.000	100,00	88,09	179.272.651	Terlaksananya kemitraan/kesepakatan, pemetaan profil dan peluang usaha kemitraan UMKM, raperda yang direvisi	20 kesepakatan, 1 dokumen kajian, 1 raperda	100,00		100,00	0,82	Provinsi Sumatera Selatan	
32	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	984.200.000	100,00	97,43	958.856.949	Meningkatnya jumlah potensi yang menjadi peluang investasi daerah	5 proyek/kegiatan	100,00		100,00	3,95	Provinsi Sumatera Selatan	
33	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	984.200.000	100,00	97,43	958.856.949	Tersedianya dokumen kajian pemetaan potensi dan peluang investasi daerah	1 dokumen	100,00		100,00	3,95	Provinsi Sumatera Selatan	
III	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.260.950.000	100,00	98,08	1.236.681.727	Terlaksananya Penyusunan Strategi dan pelaksanaan kegiatan promosi Penanaman modal kewenangan daerah provinsi	100%	100,00		100,00	5,07	Provinsi Sumatera Selatan	
34	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.260.950.000	100,00	98,08	1.236.681.727	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal provinsi	1 dokumen	100,00		100,00	5,07	Provinsi Sumatera Selatan	
35	Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	527.330.000	100,00	95,79	505.114.704	Tersedianya publikasi promosi yang dilaksanakan, website dan media sosial yang dikelola	1 event dan 2 jenis	100,00		100,00	2,12	Provinsi Sumatera Selatan	
36	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	733.620.000	100,00	99,72	731.567.023	Terlaksananya Pameran yang diikuti dalam dan luar provinsi, sarana dan prasarana promosi, website dan media sosial yang dikelola	3 event, 3 Jenis, 2 Jenis	100,00		100,00	2,95	Provinsi Sumatera Selatan	

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi	Keterangan
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini						
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
IV	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	650.000.000	100,00	93,80	609.715.045	Tercapainya Kualitas Pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, terintegrasi dan transparan	675 perizinan dan non perizinan	100,00		100,00	2,61	Provinsi Sumatera Selatan	
37	Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	650.000.000	100,00	93,80	609.715.045	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	675 perizinan dan non perizinan	100,00		100,00	2,61	Provinsi Sumatera Selatan	
38	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	450.000.000	100,00	96,03	432.137.965	Tersedianya data perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	1006 Perizinan dan Non Perizinan	100,00		100,00	1,81	Provinsi Sumatera Selatan	
39	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	200.000.000	100,00	88,79	177.577.080	Tersedianya data perusahaan/investor yang terlayani prima/penanganan pengaduan	20 Perusahaan/I nvestor	100,00		100,00	0,80	Provinsi Sumatera Selatan	
V	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.656.478.000	100,00	90,06	1.491.795.320	Tercapainya nilai realisasi Invesasi PMA dan PMDN	41,32 Trilyun	100,00		100,00	6,65	Provinsi Sumatera Selatan	
40	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.656.478.000	100,00	90,06	1.491.795.320	tingkat kepatuhan investor / pelaku usaha	95 persen	100,00		100,00	6,65	Provinsi Sumatera Selatan	
41	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	339.840.000	100,00	93,97	319.337.752	Tersedianya data perusahaan yang dipantau dan diawasi	2500 LKPM	100,00		100,00	1,37	Provinsi Sumatera Selatan	
42	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	512.550.000	100,00	82,64	423.565.478	Tersedianya data pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan fasilitasi kemudahan investasi, pembinaan kewirausahaan, dan perusahaan/investor yang berpartisipasi/patuh terhadap peraturan perizinan penanaman modal	400 Pelaku Usaha	100,00		100,00	2,06	Provinsi Sumatera Selatan	
43	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	804.088.000	100,00	93,14	748.892.090	Tersedianya data pelaku usaha yang diawasi dengan mekanisme/ pelaksanaan BAP	75 BAP	100,00		100,00	3,23	Provinsi Sumatera Selatan	

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi	Keterangan
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini						
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
VI	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	90.000.000	100,00	92,46	83.209.554	Tercapainya rasio tingkat layanan terhadap ketersediaan data dan sistem informasi penanaman modal	100%	100,00		100,00	0,36	Provinsi Sumatera Selatan	
44	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	90.000.000	100,00	92,46	83.209.554	Meningkatnya kinerja layanan data dan sistem informasi perizinan dan penanaman modal	100%	100,00		100,00	0,36	Provinsi Sumatera Selatan	
45	Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	90.000.000	100,00	92,46	83.209.554	Tersedianya dokumen/database data investasi PM/pemutahiran data dan informasi investasi PM	4 Dok/ database	100,00		100,00	0,36	Provinsi Sumatera Selatan	
	Jumlah : 34 Sub Kegiatan	24.891.577.540	100,00	90,09	22.425.961.845			100,00		100,00			

Palembang, 27 Maret 2024
Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,



Deva Octavianus Coriza, S.E., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010301996031004